

**RENCANA KERJA
SKPD
TAHUN 2019**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KOTA BANJARBARU**

PENYAJIAN DOKUMEN RENJA

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Penyusunan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan di Kasubbid Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun mekanisme penyusunan Renja SKPD dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh Kasubbid yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra SKPD, Rancangan Awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan kesesuaian dengan Renja K/L dan Renja SKPD Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
26. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.2 M a k s u d

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD

1.3.2 T u j u a n

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 bertujuan :

1. Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi yang jitu, arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.

4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Kepala Pelaksana – Kasubbag Tata Usaha dan Kasubbid - Kasubbid yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
 - 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD Kota Banjarbaru

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 *(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan

Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan wajib pelayanan dasar sosial									
	Bidang Urusan Tata Usaha									
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	721 lembar	330	391 lembar	391 lembar	100%	N/A	N/A	100%
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kelancaran Komunikasi, tersedianya Air bersih dan Penerangan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	6 orang	6 Orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%
	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	29 jenis	12 bulan	28 jenis	28 jenis	100%	29 jenis	29 jenis	100%
	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	6 jenis	12 bulan	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
	Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	3 jenis	12 bulan	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 bulan	36 Exspl	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
	Kegiatan penyediaan makanan dan	Terlaksananya	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

			Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Tersedianya Dokumen laporan keuangan	60 laporan	10 Laporan	10 laporan	10 laporan	100 %	10 laporan	30 laporan	50%
			Kegiatan perencanaan dan pelaporan manajemen aset /barang	Tersedianya dokumen laporan aset/barang	60 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	10 dokumen	30 dokumen	50%
			Bidang Urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
			Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Presentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap	100%							
			Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Masyarakat / organisasi yang mengikuti sosialisasi	30 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	300 orang	300 orang	100%
			Kegiatan Pengadaan Saran Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
			Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	6 kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	3 kelompok	3 kelompok	100%
			Kegiatan Simulasi Dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Jumlah kelompok masyarakat/ stakeholder lain yang terlibat dalam apel siaga	4 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kelompok	3 kelompok	100%
			Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tersedianya data pasca bencana	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	12 bulan	100%
			Kegiatan Kedaruratan dan Logistik	Tertanggulangnya secara darurat korban bencana	12 bulan	N/A	12 bulan	12 bulan	100%	N/A	12 bulan	100%
			Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kegiatan peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran	Perlaksananya kesiagaan dalam penanggulangan kebakaran	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	100%
			Bidang Urusan Kedaruratan dan Logistik									
			Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
			Kegiatan Pengerahan SDM Dan Logistik Untuk Pemulihan	Jumlah logistik yg di penuhi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
			Kegiatan Menunjang Operasional Tanggap Darurat Bencana	Tersedianya aparatu/relawan tanggap darurat bencana	50 orang	N/A						
			Kegiatan Pos Komando Siaga Bencanas	Tersedianya aparatur/relawan tanggap darurat bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
			Bidang Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi									
			Program Pasca Bencana	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

				Kegiatan Pengembangan Partisipasi Dan Kerjasama Rehabilitasi & Rekonstruksi	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
				Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

Kepala Pelaksana BPBD,
Kota Banjarbaru

Surianoor Akhmad, S.Sos
Pembina
NIP. 19620101 198303 1 051

Dari tabel diatas hasil pencapaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2018 pada 7 program wajib adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target 100% realisasi %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target 100 % realisasi %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % realisasi %
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan target 100 % realisasi %
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam target 100 % realisasi %
6. Program Penanganan Tanggap Darurat target 100 % realisasi %
7. Program Pasca Bencana target 100 % realisasi %

Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan disebabkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala/permasalahan :

- a. Kurang tersedianya alat-alat pemadam kebakaran (, pemadam mini, pompa gendong).
- b. Belum tersedianya SDM yang handal menangani Sistem Informasi Geografis
- c. Pelatihan teknis SDM yang kurang terhadap Sistem Informasi Geografis & pemetaan.
- d. Bencana tidak bisa diprediksi.
- e. Jumlah karyawan dan relawan yang sangat sedikit tidak sesuai dengan jumlah bencana yang terjadi
- f. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam penanganan bencana
- g. Belum adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya/melebihi target kinerja program dan kegiatan :

- a. Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Bencana ke 5 Kecamatan
- b. Terciptanya pelopor (relawan) dalam pencegahan kebakaran hutan/lahan, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung ditingkat kecamatan dan kelurahan sekota banjarbaru
- c. Terdatanya lahan dan hutan yang kosong di wilayah kelurahan dan kecamatan
- d. Dapat ditindak lanjutnya kejadian bencana sesuai waktu tanggap
- e. Tersedianya peta rawan bencana

- f. Terdatanya lahan dan hutan yang kosong di wilayah kelurahan dan kecamatan
- g. Tersedianya jalur evakuasi apabila terjadi bencana dengan skala besar.
- h. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam
- i. Terdatanya jumlah logistic yang keluar maupun yang masuk.

Dari identifikasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dan factor penyebab terpenuhinya/melebihi target program/kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan urusan Penanggulangan Bencana karena kurangnya kesadran masyarakat dan belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*..

Analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

NO	Indikator	SPM/sta n dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (tnn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Cakupan Pelaksanaan		Cakupan Pelaksana	91	92	94	96	98	100	94	98	

Penanggulangan Bencana Dan Tanggapan Darurat		an Penangg ulangan Bencana Dan Tanggapan Darurat										

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, isu – isu penting yang terkait dengan hal tersebut adalah :

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 2. Belum memadainya pendanaan yang dialokasikan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana 3. Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat tapak 4. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana
2.	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	

Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektronik/internet dalam **blog : bpbd.banjarbaru.go.id** dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan yang telah diberikan dan memberi informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pegawai serta menampung dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pengembangan aparatur formulasi isu-isu penting berupa usulan, rekomendasi dan catatan yang strategis dapat ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“Terdepan Dalam Penanggulangan Bencana”**.

dan untuk mewujudkan visi diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, yaitu:

- **Mewujudkan pelayanan administrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang profesional, peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan SDM aparatur.**
- **Mewujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi resiko bencana.**
- **Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar Saat terjadi bencana.**
- **Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana.**

Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah:BPBD Kota Banjarbaru

Lembar.....dari...
.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kecamatan	Jumlah Masyarakat / organisasi yang mengikuti sosialisasi	300 org	178.500.000	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	300 org	178.500.000	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Kejadian bencana	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	100 %	396.320.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Kejadian bencana	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	100 %	396.320.000	
	Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Lapangan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	3 kelompok	89.725.800	Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Lapangan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	3 kelompok	89.725.800	

Kegiatan Simulasi dan Peningkatan keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Danau cermin/danau seran	Jumlah kelompok masyarakat/stakeholder lain yang terlibat dalam apel siaga	3 kelompok	99.399.500	Kegiatan Simulasi dan Peningkatan keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Danau cermin/danau seran	Jumlah kelompok masyarakat/stakeholder lain yang terlibat dalam apel siaga	3 kelompok	99.399.500		
Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana	Korban Bencana	Jumlah logistik yg di penuhi	100%	102.858.000	Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana	Korban Bencana	Jumlah logistik yg di penuhi	100%	71.184.500		
Sosialisasi Operasional tanggap darurat bencana	Tempat Sosialisasi	Tersedianya Aparatur/Relawan tanggap darurat bencana	50 org	51.590.500	Kegiatan Menunjang Operasional Tanggap Darurat Bencana	Kejadian Bencana	Tersedianya aparatur/relawan tanggap darurat bencana	50 org	51.590.500		
Kegiatan Pos Komando Siaga Bencana	Pos Komando	Cakupan operasional Pusdalops PB	100%	300.769.000	Kegiatan Pos Komando Siaga Bencana & Karhutla	Pos Komando	Cakupan operasional Pusdalops PB	100%	295.043.500		
Kegiatan Pengembangan Partisipasi & Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi	Kantor	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	100%	15.636.000	Kegiatan Pengembangan Partisipasi & Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi	Kantor	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	100%	64.260.500		
Kegiatan Pendataan Dampak Kejadian Bencana	Korban bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%	32.793.000	Kegiatan Pendataan Dampak Kejadian Bencana	Korban bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%	27.699.600		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak ada perubahan,

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kecamatan	Jumlah Masyarakat / organisasi yang mengikuti sosialisasi	300 org	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Kejadian bencana	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	100 %	
	Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Lapangan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	3 kelompok	
	Kegiatan Simulasi dan Peningkatan keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Danau cermin/danau seran	Jumlah kelompok masyarakat/ stakeholder lain yang terlibat dalam apel siaga	3 kelompok	
	Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana	Korban Bencana	Jumlah logistik yg di penuhi	100%	
	Kegiatan menunjang operasional tanggap darurat bencana	Tempat Sosialisasi	Tersedianya Aparatur/Relawan tanggap darurat bencana	50 org	

	Kegiatan Pos Komando Siaga Bencana	Pos Komando	Cakupan operasional Pusdalops PB	100%	
	Kegiatan Pengembangan Partisipasi & Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi	Kantor	Persentase terkoordinasinya dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	100%	
	Kegiatan Pendataan Dampak Kejadian Bencana	Korban bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	100%	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJMN Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru ini maka tujuannya adalah

“ TERDEPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA “

Sesuai dengan visi dan misi BPBD Kota Banjarbaru tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

- MISI 1 : Merwujudkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana.
- Tujuan-1 : Meningkatkan Pelayanan Tanggap Darurat yang Cepat dan Tepat
- Sasaran-1 : Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
- Indikator Sasaran-1 : Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat
- Sasaran-2 : cakupan wilayah tanggap darurat bencana
- Indikator Sasaran-2 : Jumlah desa siaga bencana
- Program : 1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- MISI 2 : Melaksanakan tanggap darurat, pemenuhan logistik, peralatan dan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.
- Tujuan-1 : Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Sasaran-1 : Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Indikator Sasaran-1 : Cakupan tertanganinya korban bencana alam
- Program : 1. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- MISI 3 : Melaksanakan perbaikan darurat rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur, sosial ekonomi, sosial psikologi pasca bencana
- Tujuan-1 : Meningkatkan Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Sasaran-1 : Meningkatnya Responsifitas Dalam Penanganan Bencana
- Indikator Sasaran-1 : Cakupan tertanganinya korban bencana alam
- Program : Program Pasca Bencana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Target
					2018	2019
1	Meningkatnya pelayanan tanggap darurat yang cepat dan tepat	Persentase ketepatan tingkat waktu tanggap	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	85%	88%
			Cakupan wilayah tanggap darurat bencana	Jumlah desa siaga bencana	N/A	1
2	Meningkatkan Responsifitas dalam penanganan bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	85%	88%

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2019 adalah 7 (tujuh) program yaitu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi ,SDA & Listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat – rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
 - i. Penyediaan jasa Non PNS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala mebelur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian khusus petugas pelayanan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 - b. Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang
5. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam
 - c. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana
 - d. Simulasi dan peningkatan keterampilan aparat penanggulangan bencana
6. Program penanganan tanggap darurat bencana
 - a. Pengerahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana
 - b. Menunjang operasional tanggap darurat bencana
 - c. Pos Komando Siaga Bencana
7. .Program pasca bencana

- a. Pendataan dampak kejadian bencana
- b. Pengembangan partisipasi dan kerjasama rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut: Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru
Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru
lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Masyarakat / organisasi yang mengikuti sosialisasi	Kecamatan	300 org	178.500.000	APBD		6 kali	178.500.000
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Cakupan Tersedianya Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam	Kejadian bencana	100 %	68.460.000	APBD		100 %	396.320.000
	Kegiatan Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	Lapangan	3 kelompok	89.725.800	APBD		1 kegiatan	89.725.800
	Kegiatan Simulasi dan Peningkatan keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Jumlah kelompok masyarakat/ stakeholder lain yang terlibat dalam apel siaga	Danau cermin/danau seran	3 kelompok	99.399.500	APBD		1 kegiatan	99.399.500
	Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk pemulihan darurat penanggulangan bencana	Jumlah logistik yg di penuhi	Korban Bencana	100%	102.858.000	APBD		100%	71.184.500
	Kegiatan Menunjang Operasional Tanggapan Darurat Bencana	Tersedianya aparatur/relawan tanggap	Kejadian Bencana	50 orang	N/A	APBD	Dikegiatan ini pada tahun 2016-2018 belum	100%	51.590.500

			darurat bencana					ada dan baru pada tahun 2019 akan dilaksanakan kegiatan ini		
		Kegiatan Pos Komando Siaga Bencana & Karhutla	Cakupan operasional Pusalops PB	Pos Komando	100%	300.769.000	APBD		100%	295.043.500
		Kegiatan Pengembangan Partisipasi & Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase terkoordinasi dengan pihak - pihak yang terkait dengan kejadian bencana	Kantor	100%	15.636.000	APBD		100%	64.260.500
		Kegiatan Pendataan Dampak Kejadian Bencana	Cakupan terdatanya dampak kejadian bencana	Korban bencana	100%	32.793.000	APBD		100%	27.699.600

Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
 Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Tabel T-B.36.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2019 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2019 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terukur dan output rencana kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru selain menjadi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2019 oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan manusia terkait dengan pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanankepegawaian dalam menciptakan Good Gavernance.

Banjarbaru, januari 2019
Kepala Pelaksana BPBD,
Kota Banjarbaru

Surianoor Akhmad, S.Sos
Pembina
NIP. 19620101 198303 1 051